



KAJIAN AKUNTANSI

Vol.21 No.2

September 2020

ISSN : 1693 - 0614

e-ISSN : 2581 - 074X

Deliana, Abdul
Rahman

Efektivitas Audit Internal Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Provinsi Sumatera Utara.

Ilham Hidayah
Napitupulu, Anggiat
Situngkir,
Chairunnisa Arfanni

Pengaruh Transfer Pricing Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance.

Edi Sukarmanto,
Magnaz Lestira
Oktaroza, Karina Nur
Astari

Related Party Transaction Memperkuat Pengaruh Political Connection Terhadap Audit Delay?

Eka Nurmala Sari,
Muhyarsyah, Nunung
Sri Wahyuni

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Ketersediaan Anggaran Terhadap Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara.

Nurhayati,
Muhammad Kevin
Aprilio

Pengaruh Rasio Solvabilitas Terhadap Kondisi *Financial Distress*

Uli Wildan Nuryanto,
Masyhudzulhak
Djamil MZ, Achmad
Hidayat Sutawidjaya,
Ahmad Badawi Saluy.

Implikasi Keunggulan Bersaing Terhadap Kinerja Organisasi Pada Sektor Industri Manufaktur Kimia di Provinsi Banten

Riyang Mardini

Pengaruh Kinerja ICSR Terhadap *Readability* ICSR Menggunakan *Gunning Fog* Dan *Flesch-Kincaid* Indeks Dengan *Size*, Kinerja Keuangan, *Leverage* Dan *Growth* Sebagai Variabel Kontrol.

Annisa Nadiyah
Rahmani

Dampak Covid-19 Terhadap Harga Saham Dan Kinerja Keuangan Perusahaan

Diamondalisa Sofianty,
Lena Herlina.

Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Dan Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance

Diterbitkan oleh :

(P 2 U)

Pusat Penerbitan Universitas

UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG

ISSN 1693-0614



Diterbitkan oleh :

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Bandung

Penanggung Jawab

Dr. Nurleli, SE.,M.Si.,Ak,CA
(Ketua Program Studi Akuntansi FEB UNISBA)

Editor

Dr. Nurleli, SE.,M.Si.,Ak,CA

Sekretaris Editor

Dr. Rini Lestari, SE.,M.Si.,Ak,CA

Editor Pelaksana

Prof. Dr. H.M. Wahyudin Zarkasyi, SE.,M.Si.,Ak,CPA,QIA (Universitas Karawang)
Prof. Dr. Muhandi, SE., M.Si (Universitas Islam Bandung)
Dr. Atih Rohaeti Dariah, SE.,M.Si (Universitas Islam Bandung)
Dr. Andi Agus Salim, SE.,M.Si.,Ak (Universitas Bengkulu)
Dr. Y. Sunyoto, M.Si.,Ak,CA,CPAI (STIEKA Semarang)
Gatot Wahyu Nugroho, Drs.,M.Si,Ak (Universitas Muhammadiyah Sukabumi)
Dr. Fardinal, SE.,M.Si,Ak,CA (Universitas Mercu Buana Jakarta)
Dr. Ferry Hendro Basuki, SE.,M.Si,Ak,CA (Universitas Pattimura Ambon)
Dr. Agus Widarsono, SE.,M.Si,Ak,CA (Universitas Pendidikan Indonesia)
Dr. Rima Rachmawati, SE.,M.Si,Ak,CA (Universitas Widyatama)

Sekretariat

Nopi Hernawati, SE.,M.Ak

Mitra Bestari

Faisal, M.Si.,Ph.D (Universitas Diponegoro)
Dr. Sekar Mayangsari, Ak,CA (Universitas Tri Sakti)
Dr. Dyah Nirmala Arum Janie, SE.,M.Si,Ak (Universitas Semarang)
Dr. Tita Djuitaningsih, SE.,M.Si,Ak,CA (Universitas Bakrie Jakarta)
Dr. Aristanti Widyaningsih, S.Pd.,M.Si (Universitas Pendidikan Indonesia)
Dr. Sylvia Fetry E.M, SE.,SH.,M.Si,Ak,CA (Universitas Katolik Parahyangan)
Dr. Nuraini A, SE.,M.Si,Ak,CA (Universitas Syiah Kuala)
Dr. Sri Fadilah, SE.,M.Si,Ak,CA (Universitas Islam Bandung)
Dr. Iriyadi, Ak.,M.Comm,CA (STIE Kesatuan Bogor)
Dr. Ilham Hidayah Napitupulu, SE.,M.Si,Ak,CA (Politeknik Negeri Medan)
Dr. Pupung Purnamasari, SE.,M.Si,Ak,CA (Universitas Islam Bandung)
Dr. Enggar Diah Puspa Arum, SE.,M.Si,Ak,CA (Universitas Jambi)
Dr. Nasrizal, SE.,M.Si,Ak,CA (Universitas Riau)
Dr. Nengzih, SE.,M.Si,Ak,CA (Universitas Mercu Buana Jakarta)
Dr. Kania Nurcholisah, SE.,M.Si,Ak,CA (Universitas Islam Bandung).
Dr. Inta Budi Setya Nusa, SE., M.Ak (Unikom)
Dr. Deliana, SE.,Ak.,M.Si,CA (Politeknik Negeri Medan)
Dr. Rini Indahwati, SE.,Ak.,M.Si (Politeknik Negeri Medan)
Dr. Wiralestari, SE.,M.Si,Ak (Universitas Jambi)
Dr Karsam, SE., MAK, Ak, CAQMSA, CPMA (Universitas Pembangunan Jaya)
Dr Yanuar Ramadhan, SE., MM.Ak,CA (Universitas Esa Unggul Jakarta)

Alamat Penerbit/Redaksi

Program Studi Akuntansi FEB Unisba
Jl.Tamansari No.1 Bandung 40116
Telp. (022) 4264064,4203368 ext 314; Faks. (022) 4262064

Terbit dua kali dalam setahun : Maret dan September
Terbit pertama kali Maret 2003

Redaksi menerima naskah berupa artikel penelitian maupun artikel hasil pengkajian.
Pendapat yang dimuat dalam jurnal ini sepenuhnya pendapat pribadi penulis ,
tidak mencerminkan pendapat redaksi,
dan telah disajikan menurut sistematika yang ditetapkan pada halaman akhir jurnal ini .

DAFTAR ISI

Efektivitas Audit Internal Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Provinsi Sumatera Utara.....	116
<i>Deliana, Abdul Rahman</i>	
Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> Dan Profitabilitas Terhadap <i>Tax Avoidance</i>.....	126
<i>Ilham Hidayah Napitupulu, Anggiat Situngkir, Chairunnisa Arfanni</i>	
<i>Related Party Transaction</i> Memperkuat Pengaruh <i>Political Connection</i> Terhadap <i>Audit Delay</i>?.....	142
<i>Edi Sukarmanto, Magnaz Lestira Oktaroza, Karina Nur Astari</i>	
Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Ketersediaan Anggaran Terhadap Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara.....	166
<i>Eka Nurmala Sari, Muhyarsyah, Nunung Sri Wahyuni</i>	
Pengaruh Rasio Solvabilitas Terhadap Kondisi Financial Distress	198
<i>Nurhayati, Muhammad Kevin Aprilio</i>	
Implikasi Keunggulan Bersaing Terhadap Kinerja Organisasi Pada Sektor Industri Manufaktur Kimia di Provinsi Banten.....	208
<i>Uli Wildan Nuryanto, Masyhudzulhak Djamil MZ, Achmad Hidayat Sutawidjaya, Ahmad Badawi Saluy</i>	
Pengaruh Kinerja ICSR Terhadap <i>Readability</i> ICSR Menggunakan <i>Gunning Fog</i> Dan <i>Flesch-Kincaid</i> Indeks Dengan <i>Size</i>, Kinerja Keuangan, <i>Leverage</i> Dan <i>Growth</i> Sebagai Variabel Kontrol	235
<i>Riyang Mardini</i>	
Dampak Covid-19 Terhadap Harga Saham Dan Kinerja Keuangan Perusahaan.....	252
<i>Annisa Nadiyah Rahmani.</i>	
Pengaruh Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> Dan Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>.....	270
<i>Diamonalisa Sofianty, Lena Herlina</i>	

RELATED PARTY TRANSACTION MEMPERKUAT PENGARUH POLITICAL CONNECTION TERHADAP AUDIT DELAY ?

Edi Sukarmanto
Program Studi Akuntansi
Universitas Islam Bandung
edi06sukarmanto@gmail.com

Magnaz Lestira Oktaroza
Program Studi Akuntansi
Universitas Islam Bandung
ira.santoz@gmail.com

Karina Nur Astari
Program Studi Akuntansi
Universits Islam Bandung
karinanurastari89@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the effect of political connection on audit delay and the impact of using related party transactions in moderating the effect of political connection on audit delay. In testing the research objectives, the researcher used multiple regression analysis using a research sample of 59 manufacturing companies or 295 observations for the range of observations in 2013 - 2017. From the results of the tests conducted, the results showed that political connection had an effect on the increase. audit delay. This study also provides results that related party transactions further increase the influence (political connection) on audit delay. The results of this study imply that auditors must be more careful in conducting the audit process on companies that are politically connected and that carry out related party transactions. The high level of business risk that tends to occur in companies that are politically connected and conduct related party transactions gives a negative signal. Therefore, the accounting firm should assign more experienced auditors and auditors who have specialists in certain fields. For further research, it is advisable to use other indicators in measuring related party transactions, such as related purchase transactions and related guarantees.

Keywords: Audit Delay, Political Connection, Related Party Transaction.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh koneksi politis (*political connection*) terhadap *audit delay* dan dampak penggunaan transaksi pihak berelasi (*related party transaction*) dalam memoderasi pengaruh koneksi politis (*political connection*) terhadap *audit delay*. Dalam melakukan pengujian terhadap tujuan penelitian tersebut, peneliti menggunakan analisis regresi berganda dengan menggunakan sampel penelitian 59 perusahaan manufaktur atau 295 pengamatan untuk rentang pengamatan tahun 2013 – 2017. Dari hasil pengujian yang dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa koneksi politis (*political connection*) berpengaruh terhadap peningkatan *audit delay*. Penelitian ini juga memberikan hasil bahwa transaksi pihak berelasi (*related party transaction*)

semakin meningkatkan pengaruh (*political connection*) terhadap *audit delay*. Hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa auditor harus lebih seksama dalam melakukan proses audit pada perusahaan yang terkoneksi secara politis dan yang melakukan transaksi pihak berelasi. Tingginya tingkat risiko bisnis yang cenderung terjadi pada perusahaan yang terkoneksi secara politis dan melakukan transaksi pihak berelasi memberikan sinyal negatif. Oleh sebab itu, kantor akuntan hendaknya memberikan penugasan kepada auditor yang lebih berpengalaman dan auditor yang mempunyai spesialis di bidang tertentu. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk menggunakan indikator lain dalam mengukur transaksi pihak berelasi (*related party transaction*), seperti transaksi pembelian yang berelasi dan jaminan berelasi.

Kata Kunci : *Audit Delay, Political Connection, Related Party Transaction.*

1. PENDAHULUAN

Koneksi politis (*Political Connection*) telah terjadi di banyak negara, tidak terkecuali juga terjadi di Indonesia. Umumnya, praktik koneksi politis yang dilakukan oleh perusahaan di suatu negara dapat disebabkan lemahnya perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dan terjadinya konsentrasi struktur kepemilikan di suatu perusahaan (Leuz dan Oberholzer-Gee, 2006). Dalam hal adanya koneksi politis, Indonesia telah mempunyai sejarah yang sangat panjang. Ketika dijamin pemerintahan orde baru masih berkuasa (1966-1998), praktik koneksi politis dilakukan pemerintah orde baru dengan menempatkan anggota angkatan bersenjata (baik aktif maupun purnawirawan) untuk memegang posisi jabatan strategis di beberapa perusahaan (Habib, *et al.*, 2017). Memasuki era reformasi (setelah rezim orde baru), koneksi politis tidak lagi didominasi oleh militer, tetapi dipengaruhi oleh para politisi. Tidak jarang para elit politik bertindak sebagai “agen” bagi perusahaan dalam mendapatkan proyek-proyek pemerintah (Fukuoka, 2013).

Rendahnya perlindungan hukum merupakan faktor utama yang menyebabkan perusahaan melakukan praktik koneksi politik. Dengan melakukan koneksi politis, perusahaan mengharapkan adanya perlindungan hukum dari pemerintah demi keberlanjutan usaha yang dilakukan melalui peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah. Di samping itu, upaya mendapatkan akses sumber daya juga menjadi pemicu terjadinya koneksi politis. Oleh sebab itu, ketika pasar mengalami hambatan maka stabilitas usaha perusahaan akan tetap terjaga. Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa faktor nepotisme sangat mungkin terjadi dan memberi peluang perusahaan melakukan tindakan yang

merugikan pihak lainnya. Suatu hal yang wajar jika koneksi politis memberikan kesan negatif bagi beberapa pihak sehingga mendapatkan perhatian yang lebih besar dari masyarakat luas. Hal tersebut didukung hasil penelitian Chaney, *et al.*, 2011 bahwa perusahaan yang terindikasi melakukan koneksi politis cenderung melakukan praktik manajemen laba jika dibandingkan perusahaan yang tidak terkoneksi politis. Keadaan ini memberikan gambaran bahwa perusahaan yang terkoneksi politis tidak memiliki tata kelola perusahaan yang baik, sehingga diduga menyimpan risiko bisnis yang besar.

Selain itu juga, untuk memberikan kesejateraan yang lebih baik kepada pemegang saham mayoritas maupun bagi pihak-pihak yang terkoneksi secara politis, perusahaan cenderung mengabaikan kesejahteraan pemegang saham minoritas. *Tunneling* merupakan praktik yang sering digunakan oleh perusahaan dalam upaya melakukan ekspropriasi (pengambil alihan) hak pemegang saham minoritas bagi kepentingan pemegang saham mayoritas. Oleh sebab itu, perusahaan yang melakukan koneksi politis cenderung melakukan transaksi dengan pihak berelasi atau *related party transaction* (Berkman, *et al.*, 2009; Qian, *et al.*, 2011). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ketika perusahaan melakukan transaksi dengan pihak berelasi lebih banyak melakukan manajemen laba (Chen, *et al.*, 2010; Jian dan Wong, 2010) dan tindakan melakukan manajemen laba juga dilakukan perusahaan saat akan melakukan IPO (Aharony, 2010), sehingga mengakibatkan penurunan kualitas akuntansi (Helaly, 2016).

Apakah hal tersebut memberikan informasi penting bagi auditor dalam melakukan pekerjaan auditnya? Uraian di atas memberikan gambaran bahwa perusahaan yang terkoneksi politis dan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi cenderung menyimpan risiko bisnis yang lebih besar. Hasil penelitian Gul (2006) menunjukkan bahwa terjadi peningkatan biaya audit pada perusahaan yang terkoneksi secara politis. Peningkatan biaya audit sangat mungkin terjadi karena indikasi tingginya tingkat risiko bisnis yang dihadapi auditor dalam melakukan pekerjaan audit. Hal menarik ditunjukkan oleh Habib dan Muhammadi (2018) dan Guedhami, *et al* (2014) bahwa terjadi rentang waktu penyampaian laporan audit yang lebih pendek pada perusahaan yang terkoneksi politis. Digunakannya auditor Big4 oleh perusahaan yang terkoneksi secara politis umumnya dilakukan untuk tetap menjaga kredibilitas perusahaan di mata masyarakat luas. Artinya, semakin tinggi tingkat kompetensi auditor akan mampu menekan terjadinya keterlambatan penyampaian pelaporan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan apakah koneksi politis (*political connection*) memberikan pengaruh terhadap *audit delay* dan apakah transaksi pihak berelasi (*related party transaction*) lebih memperkuat pengaruh koneksi politis (*political connection*) terhadap *audit delay*. Tidak seperti pada penelitian sebelumnya, penelitian ini tidak terfokus pada auditor Big4. Oleh sebab itu, penelitian ini dimaksudkan untuk mengisi kesenjangan dengan penelitian sebelumnya karena sebatas pengetahuan peneliti belum ada penelitian yang melakukan penelitian tentang hal tersebut.

2. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 *Audit Delay*

Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada pemangku kepentingan perusahaan. Sebagai salah satu sumber informasi yang akan digunakan pemakai dalam pengambilan keputusannya, ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan keuangan merupakan faktor utama yang perlu diperhatikan perusahaan. Namun demikian, keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan sangat sulit untuk dihindari perusahaan. Hal ini dapat disebabkan dalam menerbitkan opini terhadap laporan keuangan yang diaudit, auditor akan melakukan proses penyelesaian audit yang sangat krusial. Di samping memerlukan bukti-bukti tambahan terhadap peristiwa-peristiwa di luar periode pelaporan (*subsequent event*) yang ikut mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan, auditor juga memerlukan waktu dalam menyimpulkan hasil audit dalam bentuk opini yang diberikan (Arens, *et al.*, 2017). Adanya rentang waktu penyampaian laporan keuangan auditan tersebut umumnya disebut dengan *audit delay*. Lamanya *audit delay* merupakan banyaknya hari yang dihabiskan auditor dalam menyelesaikan proses audit yang dilakukan, terhitung dari tanggal tutup buku perusahaan hingga dikeluarkannya laporan auditor (Ashton, *et al.*, 1987; Bamber, *et al.*, 1993). Dalam ketentuan yang ditetapkan oleh BAPEPAM (2003) menyebutkan bahwa batas toleransi keterlambatan yang diberikan kepada perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangan beserta laporan auditor independen adalah 90 hari setelah tanggal tutup buku.

Audit delay merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan pihak luar untuk mengukur efisiensi audit, lamanya waktu yang digunakan auditor dapat dianggap sebagai inefisiensi audit (Bamber, *et al.*, 1993). Tentu saja persepsi ini tidak seluruhnya dapat

dibenarkan. Durand (2019) menyimpulkan bahwa terjadinya *audit delay* dapat dipengaruhi oleh (1) risiko bisnis auditor (*auditor business risk*), (2) kompleksitas audit (*audit complexity*), (3) efektivitas tata kelola klien/perusahaan (*corporate governance*), (4) jenis opini yang dikeluarkan (*audit opinion*), dan (5) faktor-faktor lain yang berkaitan dengan pekerjaan lainnya (*other work-related factors*).

Pertama, risiko bisnis auditor (*auditor business risk*) merupakan risiko yang akan diterima auditor dari suatu perikatan. Risiko ini sangat berhubungan dengan risiko bisnis yang terdapat dalam aktivitas operasi perusahaan, dan kondisi keuangan perusahaan merupakan faktor utama yang dapat meningkatkan risiko bisnis perusahaan. Perusahaan yang mempunyai risiko bisnis besar akan mengakibatkan pekerjaan audit menjadi lebih lama, karena auditor akan semakin banyak mengumpulkan bukti-bukti untuk mendukung hasil audit. *Kedua*, kompleksitas audit (*audit complexity*), faktor ini sangat dipengaruhi oleh ukuran perusahaan yang diaudit. Perusahaan berskala besar akan menyimpan risiko bisnis lebih besar dibandingkan perusahaan berskala kecil. Hal akan mengakibatkan lamanya pekerjaan audit. *Ketiga*, efektivitas tata kelola perusahaan (*corporate governance*) juga akan mempengaruhi lamanya auditor dalam melakukan pekerjaan audit. Perusahaan dengan penerapan tata kelola yang baik, akan membentuk tingkat pengendalian internal menjadi lebih baik. Hal ini menimbulkan keyakinan auditor terhadap kondisi laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan. Oleh sebab itu, keberadaan tata kelola yang baik akan meminimalisir risiko audit dan prosedur audit yang direncanakan (Cohen dan Hanno, 2000). *Keempat*, jenis opini yang dikeluarkan (*audit opinion*). Umumnya perusahaan yang mendapatkan opini wajar tanpa syarat akan cenderung menerbitkan laporan keuangan lebih cepat jika dibandingkan dengan jenis opini lainnya (Durand, 2018). Hal ini mengindikasikan ada/tidaknya masalah penting yang akan menjadi perhatian auditor. *Kelima*, faktor-faktor lain yang berkaitan dengan pekerjaan lainnya (*other work-related factors*) dapat berhubungan dengan keberadaan dari *extraordinary items* yang perlu mendapatkan perhatian lebih dari auditor karena dapat dimanfaatkan perusahaan untuk “menyimpan” sesuatu yang disembunyikan. Banyaknya jenis *extraordinary items* akan menjadikan pekerjaan audit menjadi lebih lama.

2.2 *Political Connection*

Koneksi politis (*political connection*) secara umum merupakan bentuk terjadinya hubungan antara perusahaan dengan para politisi. Koneksi tersebut dapat terjadi apabila setidaknya terdapat satu politisi bertindak sebagai pemegang saham yang mempunyai pengendalian (baik langsung maupun tak langsung) terhadap perusahaan (Faccio, 2006; Habib dan Muhammadi, 2018). Di samping itu juga, koneksi politis dapat juga terjadi apabila salah satu anggota dewan komisaris, dewan direksi merupakan seorang menteri, anggota perlemen, kepala daerah, maupun politisi dari suatu partai (Adhikari, *et al.*, 2006 dan Habib dan Muhammadi, 2018).

Terjadinya koneksi politis antara perusahaan dengan pihak politisi banyak terjadi di beberapa negara, termasuk di dalamnya Indonesia. Terdapat beberapa alasan munculnya koneksi antara perusahaan dengan pihak politisi, diantaranya adalah (1) ketika pasar tidak berjalan dengan baik, perusahaan berharap mendapatkan perlindungan sehingga mengurangi rasa kekhawatiran perusahaan, (2) pemerintah, pejabat pemerintah, maupun politisi dianggap pihak yang mempunyai kekuasaan dalam mengendalikan sumber daya maupun proyek-proyek yang didanai negara, dan (3) perusahaan berharap mendapatkan sumber daya yang diperlukan secara mudah (Li, *et al.*, 2008; Wu, *et al.*, 2012; Habib dan Muhammadi, 2018). Dengan adanya koneksi politis tersebut, perusahaan berharap peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah dapat lebih berpihak kepada mereka, lebih mudah mendapatkan akses yang mereka butuhkan, dan mendapatkan jaminan perlindungan. Di sisi yang berbeda, koneksi politis dimanfaatkan oleh para politisi dan pejabat pemerintah untuk tujuan mendapatkan bantuan dana dalam mendukung kampanye, menjaga stabilitas kelompok politis mereka, dan mempertahankan posisi mereka dalam otoritas pemerintahan (Miettinen dan Poutvaara, 2014; Choi dan Thum, 2009).

Timbulnya manfaat yang saling berkorelasi tersebut menimbulkan adanya peluang terjadinya perilaku nepotisme sehingga sering mendapatkan perhatian dan pengawasan yang lebih besar dari pihak-pihak yang berkepentingan. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perusahaan yang terindikasi melakukan koneksi politis rentan akan perbuatan *corporate overinvestment* (Su, *et al.*, 2013), *tunneling* (Jiang, *et al.*, 2010), dan manajemen laba (Chaney, *et al.*, 2011) sehingga akan merugikan pemegang saham lainnya. Oleh sebab itu, perusahaan-perusahaan yang terindikasi

melakukan koneksi politis perlu dilakukan pengendalian dan pemantauan yang lebih besar.

2.3 *Related Party Transaction*

Transaksi-transaksi yang terjadi pada perusahaan umumnya melibatkan pihak-pihak eksternal perusahaan, yang secara tidak langsung tidak mempunyai hubungan apapun dengan perusahaan. Walaupun demikian, tidak jarang transaksi yang dilakukan akan melibatkan pihak-pihak internal perusahaan (umumnya disebut sebagai pihak berelasi). Transaksi yang melibatkan pihak-pihak berelasi umumnya disebut sebagai transaksi pihak berelasi (*related party transaction*). Ikatan Akuntan Indonesia/IAI (2018) menyebutkan bahwa transaksi pihak berelasi merupakan perubahan kepemilikan atas sumber daya, baik berbentuk barang maupun jasa, utang-piutang yang terjadi antara perusahaan pelapor dengan pihak-pihak berelasi. Lebih lanjut dikemukakan oleh IAI (2018) bahwa pihak yang berelasi adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan suatu entitas penyusun laporan keuangan. Umumnya, pihak-pihak yang berelasi tersebut mempunyai pengendalian dan pengaruh terhadap entitas penyusun laporan keuangan.

Dibanyak literatur, masih banyak kontradiksi apakah aktivitas transaksi pihak berelasi memberikan keuntungan atau kerugian bagi para pemangku kepentingan (Yeh, *et al.*, 2012). Peraturan-peraturan yang ada (termasuk didalamnya standar akuntansi keuangan) lebih mengatur tentang pengungkapan transaksi pihak berelasi, tetapi tidak secara tegas menentukan apakah transaksi pihak berelasi berbahaya atautkah memberikan keuntungan bagi perusahaan dan pemegang saham (Chien dan Hsu, 2010). Terkait hal tersebut, Gordon, *et al* (2004) menyatakan bahwa transaksi pihak berelasi merupakan transaksi yang bersifat efisien. Berbeda dengan transaksi yang melibatkan pihak eksternal (bukan berelasi), perusahaan yang melakukan transaksi pihak berelasi akan mampu mengotimalkan alokasi sumber daya, menekan risiko yang akan terjadi, dan menurunkan biaya transaksi sehingga memberikan manfaat lebih besar bagi pemegang saham (Chen, *et al.*, 2012). Peningkatan efisiensi terjadi pada saat dilakukan jual-beli antar pihak berelasi karena pihak-pihak berelasi mempunyai pemahaman yang lebih baik tentang aktivitas dan kebutuhan spesifik diantara perusahaan yang berelasi.

Pada sisi yang berbeda, Gordon, *et al* (2004) juga menyatakan bahwa transaksi pihak berelasi dapat mengakibatkan terjadinya konflik kepentingan antara tanggung jawab manajemen kepada pemegang saham dengan fungsi pengawasan yang perlu

dilakukan. Pada satu sisi, manajemen perlu melakukan fungsi pengawasan terhadap aktivitas perusahaan bagi kepentingan seluruh pemegang saham, sementara itu pihak pengendali (mayoritas) dapat memanfaatkan kegiatan transaksi pihak berelasi untuk mengambi-alih (*expropriation*) hak pemegang saham minoritas (non-pengendali) melalui kegiatan *tunneling* (Berkman, *et al.*, 2009; Cheung, *et al.*, 2006). Jiang, *et al.* (2010) menyatakan bahwa pinjam-meminjam (*lending-borrowing*) yang terjadi antar pihak berelasi sangat bersifat oportunistik dan dapat berfungsi mengambil alih sumber daya perusahaan. Di samping itu juga, pengambilalihan sumber daya dari pemegang saham minoritas dapat timbul dari transaksi jual-beli aset, barang dan jasa, dan pembayaran tunai kepada perusahaan terkait. Oleh sebab itu, karena sifatnya yang berulang dan juga dapat menimbulkan utang-piutang diantara pihak berelasi maka transaksi jual-beli barang dan jasa merupakan kegiatan yang paling sering dilakukan perusahaan untuk memanipulasi transaksi pihak berelasi (Habib, *et al.*, 2017). Terjadinya pengambilalihan (*expropriation*) melalui kegiatan *tunneling* ini diindikasikan dengan nilai residual RPT-Sales yang bernilai lebih kecil dari 0 dan nilai residual RPT-Loan yang bernilai lebih besar dari 0 atau disebut dengan RPT yang bersifat abnormal (Berkman, *et al.*, 2009; Cheung, *et al.*, 2006; Jiang, *et al.*, 2010).

2.4. Political Connection dan Audit Delay

Telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, banyak keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan dari adanya koneksi politis. Beberapa penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa beberapa kemudahan yang dapat diperoleh perusahaan dengan adanya koneksi politis, diantaranya adalah kemudahan mendapatkan pinjaman (Leuz dan Oberholzer-Gee, 2006; Faccio, 2006; Boubakri *et al.*, 2012), memperoleh pinjaman dengan biaya rendah (Houston *et al.*, 2014), mendapatkan kontrak-kontrak pemerintah dan peraturan-peraturan yang menguntungkan (Goldman, *et al.*, 2009). Adanya kemudahan-kemudahan tersebut menimbulkan dampak negatif dari banyak pihak terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan koneksi politis. Masyarakat luas menganggap bahwa perusahaan yang terkoneksi politis akan mendapatkan perlakuan istimewa jika dibandingkan dengan perusahaan yang tidak melakukan koneksi politis.

Dari hal di atas menunjukkan bahwa perusahaan yang terkoneksi secara politis kurang mendapatkan pengawasan dan pemantauan jika dibandingkan dengan perusahaan yang tidak terkoneksi (Faccio, 2006). Kondisi ini memberikan gambaran bahwa

perusahaan terkoneksi diduga mempunyai tata kelola yang buruk, sehingga menyimpan risiko yang besar. Oleh sebab itu, dalam melakukan audit terhadap perusahaan yang terkoneksi politis auditor akan bertindak lebih hati-hati dan hal ini akan berdampak pada kebutuhan waktu audit yang lebih lama. Gul (2006) menemukan adanya peningkatan biaya audit pada perusahaan yang terkoneksi politis di Malaysia ketika terjadi krisis ekonomi. Hal ini dapat disebabkan bahwa selama masa krisis, perusahaan yang terkoneksi politis diduga terlibat dalam melakukan rekayasa laporan keuangan untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya.

Untuk meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan yang terkoneksi politis, Guedhami (2014) dan Khan, *et al* (2016) dalam penelitiannya menemukan bahwa penggunaan auditor *Big4* dan auditor spesialis industri oleh perusahaan terkoneksi politis mengalami peningkatan yang sangat besar jika dibandingkan dengan penggunaan auditor non-*Big4*. Di samping untuk tetap mendapatkan tingkat kepercayaan dari masyarakat, peningkatan penggunaan tersebut karena auditor *Big4* dan auditor spesialis industri dianggap memiliki tingkat kompetensi yang lebih tinggi dan pada akhirnya akan dapat memperpendek rentang waktu penyampaian laporan keuangan (Guedhami, *et al.*, 2014; Habib dan Muhammadi, 2018). Dari ungkapan diatas, maka hipotesis pertama yang akan diuji pada penelitian ini adalah:

H1. Koneksi Politis (Political Connection) berpengaruh terhadap audit delay.

2.5. Related Party Transaction, Political Connection dan Audit Delay.

Sama halnya dengan koneksi politis, masih terjadi pendapat yang berlawanan apakah transaksi pihak berelasi memberikan keuntungan atautkah sebaliknya merugikan bagi para pemangku kepentingan perusahaan. Terlepas dari pertentangan tersebut, hasil penelitian yang dikemukakan oleh Berkman, *et al* (2009) dan Qian, *et al* (2011) menunjukkan bahwa perusahaan yang terlibat dalam koneksi politis secara oportunistik cenderung menggunakan transaksi pihak berelasi. Hal ini dilakukan perusahaan untuk memberikan keuntungan bagi pemegang saham maupun pihak-pihak yang terkoneksi politis tetapi mengorbankan kepentingan pihak pemegang saham minoritas. Proses ekspropriasi ini dilakukan melalui proses *tunneling*, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan manajemen untuk membeli aset anak perusahaan dengan harga yang relatif murah dan menjualnya kembali kepada pihak eksternal dengan harga tinggi (Johnson, *et al.*, 2000; Jiang, *et al.*, 2010) dan tingginya kecenderungan perusahaan melakukan praktik-praktik

manajemen laba (Chen, *et al.*, 2010; Jian dan Wong, 2010). Secara khusus Aharony (2010) meneliti perusahaan yang melakukan IPO di pasar modal Cina, hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan yang melakukan IPO melakukan praktik manajemen laba dengan menggunakan transaksi dengan pihak berelasi.

Kondisi tersebut sangat mungkin terjadi karena dengan kekuatan pemegang saham mayoritas, manajemen mempunyai dorongan yang kuat untuk melakukan praktik *tunneling* untuk mendapatkan keuntungan dan menyembunyikan kinerja yang sebenarnya dari pihak di luar perusahaan. Hal ini memberikan sinyal negatif bagi auditor ketika melakukan pekerjaan audit mereka. Auditor dituntut untuk lebih berhati-hati dalam mendapatkan bukti-bukti audit untuk kegunaan penerbitan opini mereka. Dengan demikian, auditor sangat mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama ketika melakukan audit pada perusahaan yang terindikasi memiliki koneksi politis dan melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi. Dari ungkapan diatas, maka hipotesis kedua yang akan diuji pada penelitian ini adalah :

H2. *Transaksi pihak berelasi (Related Party Transaction) memoderasi pengaruh koneksi politis (Political Connection) terhadap audit delay.*

3. METODE PENELITIAN

3.1. Data dan Sampel Penelitian

Untuk kegunaan pengujian hipotesis yang telah diajukan, data yang digunakan pada penelitian ini berhubungan dengan *audit delay*, *political connections*, *related party transaction*, dan data-data keuangan perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan rentang pengamatan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Untuk mendapatkan data-data penelitian sesuai dengan rentang pengamatan tersebut, maka perusahaan manufaktur yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sampai dengan 31 Desember 2012. Pemilihan perusahaan manufaktur pada penelitian ini didasarkan pada pertimbangan karena 30% dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia didominasi oleh perusahaan manufaktur. Di samping itu juga, pada perusahaan manufaktur mempunyai kompleksitas usaha lebih besar dibandingkan dengan sektor lainnya.

Pada penelitian ini, pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive judgement sampling*, dimana sampel dipilih berdasarkan kriteria-kriteria tertentu (Sekaran, 2016), maka kriteria-kriteria yang digunakan adalah :

- a. Perusahaan yang secara konsisten menggunakan mata uang rupiah dalam pelaporan keuangannya.
- b. Perusahaan yang selama periode pengamatan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi.
- c. Mempunyai data yang lengkap terkait dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Atas dasar kriteria-kriteria tersebut, maka jumlah perusahaan sampel dan jumlah pengamatan (*firm-year*) yang digunakan pada penelitian ini seperti tersaji pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1
Hasil Seleksi Sampel

Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sampai dengan 31 Desember 2012	128
<u>Dikurangi :</u>	
- Perusahaan yang tidak secara konsisten menggunakan mata uang rupiah dalam penyusunan laporan keuangan.	(27)
- Perusahaan yang tidak secara konsisten melakukan transaksi dengan pihak berelasi secara konsisten selama periode pengamatan	(17)
- Perusahaan yang tidak mempunyai data lengkap selama periode pengamatan	(25)
Jumlah perusahaan sampel	59
Masa Pengamatan	5
Jumlah Observasi (<i>firm-year</i>)	295

Sumber : Data yang diolah

3.2 Definisi Variabel dan Pengukurannya

Variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini adalah *Audit Delay* (AuDel), yang menunjukkan jumlah hari yang digunakan auditor dalam melakukan penyelesaian audit. Oleh sebab itu, AuDel diukur berdasarkan jumlah hari terhitung dari akhir tahun fiskal (31 Desember) perusahaan sampai dengan dikeluarkannya laporan audit oleh kantor akuntan (Ashton, *et al.*, 1987; Bamber, *et al.*, 1993; Habib dan Bhuiyan, 2011; Habib dan Muhammadi, 2018).

Penelitian ini menggunakan *political connection* (PolC) sebagai variabel independen. Pada penelitian ini, suatu perusahaan dikatakan mempunyai koneksi politis jika setidaknya terdapat satu pemegang saham, anggota dewan komisaris, dan anggota dewan direksi merupakan anggota parlemen, menteri, dan kepala pemerintah daerah atau terkait dengan politisi atau partai pada periode saat ini maupun sebelumnya (Faccio, 2006; Adhikari, *et al.*, 2006; Habib dan Muhammadi, 2018). Variabel *political connection* diukur dengan memberi nilai 1 jika perusahaan terlibat dalam koneksi politis, dan nilai 0 jika tidak terjadi koneksi politis.

Selain menggunakan *audit delay* (AuDel) dan *political connection* (PolC) sebagai variabel dependen dan independen, penelitian ini juga menggunakan *related party transaction* (RPT) sebagai variabel pemoderasi. Seperti telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, RPT dapat dibagi ke dalam RPT-Sales dan RPT-Loan. Kedua RPT tersebut dapat bersifat positif (normal) dan bersifat negatif (abnormal). Mengikuti Jian dan Wong (2010) kedua RPT tersebut diukur dengan tahapan sebagai berikut :

1. Menentukan rasio RPT-Sales dan RPT-Loan, yang dihitung dengan cara :
 - RPT-Sales merupakan pembagian penjualan yang berasal transaksi penjualan yang berelasi dengan total pendapatan perusahaan.
 - RPT-Loan merupakan pembagian dari selisih RP-Lending dengan RP-Borrowing dengan total aktiva.
2. Menentukan RES_RPT_{Sales} dan RES_RPT_{Loan} yang merupakan nilai residual dari hasil regresi kedua RPT, dengan ukuran perusahaan (SIZE), rasio utang (LEV), dan pertumbuhan perusahaan (GROWTH) dengan persamaan regresi berikut ini :

$$- RPT-Sales = \alpha + \beta_1 SIZE_{i,t} + \beta_2 LEV_{i,t} + \beta_3 GROWTH_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

..... (1)

$$- RPT-Loan = \alpha + \beta_1 SIZE_{i,t} + \beta_2 LEV_{i,t} + \beta_3 GROWTH_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

..... (2)

Jika RES_RPT_{Sales} bernilai lebih kecil dari 0, maka RPT-Sales tersebut bersifat abnormal, sedangkan untuk RES_RPT_{Loan} jika bernilai lebih besar dari 0, maka RES_RPT_{Loan} bersifat abnormal.

Di samping ketiga kelompok variabel di atas, penelitian ini juga menyertakan beberapa variabel kontrol untuk mengendalikan karakteristik spesifik perusahaan yang diduga ikut mempengaruhi *audit delay*, yaitu :

- SIZE, merupakan ukuran perusahaan yang diproksikan oleh logaritma natural dari total Aset perusahaan *i* pada tahun *t*.
- LEV, merupakan rasio utang perusahaan *i* pada tahun *t*, yang dihitung sebagai penjumlahan dari utang jangka pendek perusahaan *i* pada tahun *t* dan utang jangka panjang perusahaan *i* pada tahun *t* diskalakan dengan total aset perusahaan *i* pada tahun *t*.
- GROWTH, merupakan tingkat pertumbuhan perusahaan yang diproksikan oleh tingkat pertumbuhan aktiva perusahaan *i* pada periode *t*.

3.3 Model Penelitian

Pada bagian sebelumnya telah dikemukakan bahwa penelitian ini dilakukan untuk menguji bahwa variabel *political connection* (PolC) akan memberikan pengaruh terhadap *audit delay* (AuDel) dan variabel RPT-Sales dan RPT-Loan memoderasi pengaruh *political connection* (PolC) terhadap *audit delay* (AuDel). Kedua hipotesis tersebut diuji dengan menggunakan alat uji analisis regresi berganda.

Untuk kegunaan pengujian hipotesis pertama, yaitu *political connection* (PolC) berpengaruh terhadap *audit delay* (AuDel), model penelitian yang digunakan adalah :

$$AuDel_{i,t} = \alpha_1 + \beta_1 PolC_{i,t} + \beta_2 SIZE_{i,t} + \beta_3 LEV_{i,t} + \beta_4 GROWTH_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \dots \dots \dots (3)$$

Selanjutnya, untuk kegunaan pengujian hipotesis kedua, yaitu kedua RPT memoderasi pengaruh *political connection* (PolC) terhadap *audit delay* (AuDel), model penelitian yang digunakan adalah :

$$AuDel_{i,t} = \alpha_1 + \beta_1 PolC_{i,t} + \beta_2 PolC * RES_RPT_{Sales} + \beta_3 PolC * RES_RPT_{Loan} + \beta_4 SIZE_{i,t} + \beta_5 LEV_{i,t} + \beta_6 GROWTH_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \dots \dots \dots (4)$$

Dimana :

AuDel_{*i,t*} merupakan jumlah hari yang digunakan auditor dalam menyelesaikan proses akhir audit perusahaan *i* pada tahun *t*

PolC_{*i,t*} merupakan variabel *dummy* yang diberi nilai 1 jika perusahaan *i* pada tahun *t* melakukan *political connection*, dan 0 jika sebaliknya.

RES_RPT_{Sales} merupakan nilai residual dari *related part transacton Sales* perusahaan i pada tahun t .

RES_RPT_{Loan} merupakan nilai residual dari *related part transacton Loan* perusahaan i pada tahun t .

$SIZE_{i,t}$ merupakan ukuran perusahaan i pada tahun t .

$LEV_{i,t}$ merupakan *Leverage* perusahaan perusahaan i pada tahun t .

$GROWTH_{i,t}$ merupakan pertumbuhan perusahaan perusahaan i pada tahun t .

4. HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan, hasil statistik deskriptif untuk keseluruhan variabel yang digunakan pada penelitian ini tersaji pada Tabel 2 berikut ini :

Tabel 2
Statistik Deskriptif

Panel A					
Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
AuDel	295	44	166	76.67	15,637
RES_RPT_{Sales}	295	-0,8837	1,1511	0,0000	0,4893
RES_RPT_{Loan}	295	-0,1429	0,0927	0,0000	0,0262
SIZE	295	99,922 juta	295.646.000 juta	11.957.583 juta	34.490.486 juta
LEV	295	0,0004	1,5711	0,4867	0.2471
GROWTH	295	-0,4770	1,130	-0,1269	0,1838
Panel B					
Tahun			Political Connection	Persentase	
2013			12	20,33%	
2014			12	20.33%	
2015			13	22,03%	
2016			13	22,03%	

2017	13	22,03%
Total	63	21.35%
AuDel = Audit Delay PolC = Political Connections RES_RPT _{Sales} = Related Party Transaction-Sales RES_RPT _{Loan} = Related Party Transaction-Loan SIZE = Ukuran Perusahaan LEV = Leverage GROWTH = Pertumbuhan Perusahaan		

Sumber : Hasil pengolahan data

Tabel 2 di atas, melaporkan hasil statistik deskriptif untuk seluruh variabel penelitian yang digunakan pada penelitian ini. Pada Panel A menunjukkan bahwa rata-rata *audit delay* (AuDel) adalah sebesar 76. Nilai maksimum *audit delay* sebesar 166 hari hanya terjadi pada satu perusahaan, sedangkan secara mayoritas perusahaan sampel (45 perusahaan) pada penelitian mengalami *audit delay* berkisar antara 70-88 hari. Jika dibandingkan dengan batasan maksimum yang ditetapkan oleh BAPEPAM bahwa selambat-lambatnya laporan audit harus disampaikan 90 hari setelah tutup buku, maka dapat disimpulkan bahwa *audit delay* selama periode pengamatan cenderung panjang. Untuk nilai RES_RPT_{Sales}, mempunyai nilai rata-rata sebesar 0.0000 mendekati nilai minimum sebesar -0,8837. Hal ini ditunjukkan bahwa sebanyak 31 perusahaan sampel (dari total 59 perusahaan) yang mempunyai nilai RES_RPT_{Sales} di bawah 0 (< 0). Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan sampel cenderung melakukan transaksi penjualan berelasi yang bersifat abnormal. Kondisi yang berbeda ditunjukkan oleh RES_RPT_{loan}. Nilai rata-rata RES_RPT_{loan} sebesar 0,000 lebih mendekati nilai maksimum sebesar 0,0927. Hal ini juga ditunjukkan pula dari banyaknya perusahaan (39 perusahaan) yang mempunyai nilai RES_RPT_{loan} di atas 0 (> 0). Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan sampel pada penelitian ini cenderung melakukan transaksi utang berelasi yang bersifat abnormal. Untuk ketiga variabel kontrol yang digunakan, yaitu SIZE, LEV, dan GROWTH masing-masing mempunyai nilai rata-rata sebesar Rp 11.957.583 juta, 0,4867, dan -0,1269. Jika dibandingkan dengan rata-rata masing-masing variabel kontrol, SIZE perusahaan lebih mendekati nilai minimum sebesar Rp 99,922 juta. Hal ini menunjukkan bahwa SIZE perusahaan sampel cenderung rendah. Untuk nilai rata-rata LEV mendekati nilai maksimum (tanpa perusahaan yang mengalami defisiensi modal) sebesar 0,475. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan sampel mempunyai utang yang cukup besar

dibandingkan dengan total aset yang ada. Terkait dengan GROWTH, nilai rata-rata perusahaan sampel cenderung mendekati nilai minimum (-0,4770). Hal ini menunjukkan bahwa selama periode pengamatan, perusahaan sampel mengalami penurunan pertumbuhan.

Panel B menyajikan statistik deskriptif dari variabel *political connection* (PolC) yang diukur dengan menggunakan *dummy* dari perusahaan yang mempunyai koneksi politis. Dari total 295 pengamatan, terdapat 63 pengamatan (21,35%) yang terindikasi melakukan koneksi politis. Secara rinci disajikan pada Panel B, dari 59 perusahaan sampel terdapat 12 hingga 13 perusahaan atau berkisar antara 20% hingga 22% perusahaan sampel yang melakukan koneksi politis. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan sampel yang melakukan koneksi politis cenderung sedikit. Koneksi politis yang terjadi pada perusahaan sampel umumnya didominasi oleh adanya politisi (baik sebagai anggota parlemen maupun sebagai anggota salah satu partai) yang menjabat sebagai salah satu pemegang saham, anggota dewan komisaris atau anggota dewan direksi.

4.1.2 Hasil Pengujian Hipotesis 1

Seperti telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, hipotesis 1 dimaksudkan untuk melakukan pengujian bahwa *political connection* (PolC) berpengaruh terhadap *audit delay*. Hasil pengujian terhadap hipotesis 1 disajikan pada Tabel 3 berikut ini :

Tabel 3
Hasil Pengujian 1

$$(AuDel_{i,t} = \alpha_1 + \beta_1 PolC_{i,t} + \beta_2 SIZE_{i,t} + \beta_3 LEV_{i,t} + \beta_4 GROWTH_{i,t} + \varepsilon_{i,t})$$

	AuDel	
	Koefisien	Signifikansi
PolC	0,067	0.003*
SIZE	0,010	0.085***
LEV	0,132	0.001**
GROWTH	0.019	0.264

Koefisien Determinasi (R^2) = 0,097
*)Signifikan pada tingkat 1% **)Signifikan pada tingkat 5% ***)Signifikan pada tingkat 10%
AuDel = Audit Delay PolC = Political Connections PolC*RES_RPT _{Sales} = Related Party Transaction-Sales PolC*RES_RPT _{Loan} = Related Party Transaction-Loan SIZE = Ukuran Perusahaan LEV = Leverage GROWTH = Pertumbuhan Perusahaan

Sumber : Hasil pengolahan data

Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel PolC (*Political Connection*) sebesar 0,003 lebih kecil dari tingkat alpha (α) sebesar 0,01. Disamping itu juga, koefisien PolC menunjukkan nilai koefisien positif sebesar 0,067. Hasil ini menunjukkan mendukung hipotesis 1 bahwa *Political Connection* (PolC) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap *audit delay* (AuDel). Hal ini dapat disimpulkan di mana hasil pengujian mendukung argumen bahwa *political connection* akan meningkatkan lamanya auditor dalam melakukan penyelesaian proses audit yang dilakukan. Hasil pengujian ini menunjukkan hasil yang berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Habib dan Muhammadi (2018), yang menunjukkan *audit delay* yang lebih pendek. Hal ini disebabkan pada penelitian yang dilakukan oleh Habib dan Muhammadi (2018) lebih dititik beratkan pada penggunaan auditor *Big4* dalam mengaudit perusahaan yang terkoneksi politis.

Hasil lain yang ditunjukkan oleh Tabel 3 adalah variabel kontrol SIZE dan LEV menunjukkan koefisien positif dan signifikan (pada tingkat signifikansi masing sebesar 10% dan 5%). Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan (SIZE) dan tingkat utang (LEV) akan dapat mempengaruhi lamanya auditor dalam menyelesaikan proses audit. Untuk variabel kontrol tingkat pertumbuhan perusahaan (GROWTH) tidak memberikan pengaruh terhadap lamanya auditor dalam menyelesaikan proses audit. Hal dapat disebabkan perusahaan sampel pada penelitian ini cenderung mengalami penurunan pertumbuhan.

Di samping itu juga, besaran koefisien determinasi (R^2) menunjukkan nilai sebesar 0,097. Hal ini menunjukkan bahwa *political connection* (PolC) bersama-sama dengan variabel kontrol yang digunakan (SIZE, LEV, dan GROWTH) mampu

meningkatkan *Audit Delay* (AuDel) sebesar 9,70% dan sisanya (sebesar 90,30%) sangat dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4.1.3 Hasil Pengujian Hipotesis 2

Hipotesis 2 yang diajukan pada penelitian ini adalah *related party transaction* (RPT) mampu memoderasi pengaruh *political connection* (PolC). Untuk kegunaan pengujian hipotesis 2, peneliti memasukan variabel RPT (RES_RPT_{Sales} dan RES_RPT_{Loan}) sebagai variabel moderasi ke dalam persamaan 3, sehingga model penelitian yang digunakan untuk pengujian hipotesis 2 dilakukan dengan menggunakan persamaan 4. Hasil pengujian terhadap hipotesis 2 disajikan pada Tabel 4.

Dari Tabel 4 di bawah menunjukkan bahwa secara keseluruhan menunjukkan hasil yang tidak berbeda dengan hasil pengujian hipotesis 1. Variabel *Political Connection* (PolC) tetap menunjukkan nilai koefisien yang positif dan nilai signifikansinya (0,056) tetap lebih kecil dari nilai alpha ($\alpha = 0,05$). Variabel moderasi RPT (RES_RPT_{Sales} dan RES_RPT_{Loan}) menunjukkan bahwa nilai koefisien masing-masing bersifat positif (0,132 dan 2,273) dengan nilai signifikansi masing-masing sebesar 0,016 dan 0,037 yang lebih kecil dari nilai alpha ($\alpha = 0,05$).

Tabel 4
Hasil Pengujian 2

$$(AuDel_{i,t} = \alpha_1 + \beta_1 PolC_{i,t} + \beta_2 PolC * RES_RPT_{Sales} + \beta_3 PolC * RES_RPT_{Loan} + \beta_4 SIZE_{i,t} + \beta_5 LEV_{i,t} + \beta_6 GROWTH_{i,t} + \varepsilon_{i,t})$$

	AuDel	
	Koefisien	Signifikansi
PolC	0,056	0.002**
PolC*RES_RPT _{Sales}	0,132	0,016**
PolC*RES_RPT _{Loan}	2,273	0,037**
SIZE	0,010	0.031**
LEV	0,123	0.000*
GROWTH	0.010	0.444
Koefisien Determinasi (R^2) = 0,172		
*)Signifikan pada tingkat 1%		
**)Signifikan pada tingkat 5%		
***)Signifikan pada tingkat 10%		

AuDel = Audit Delay
PolC = Political Connections
PolC*RES_RPT _{Sales} = Related Party Transaction-Sales
PolC*RES_RPT _{Loan} = Related Party Transaction-Loan
SIZE = Ukuran Perusahaan
LEV = Leverage
Growth = Pertumbuhan Perusahaan

Sumber : Hasil pengolahan data

Artinya, perusahaan yang terlibat RPT abnormal secara signifikan akan ikut memperkuat pengaruh *Political Connection* (PolC) terhadap *Audit Delay* (AuDel). Di samping itu juga, dari hasil di atas menunjukkan bahwa RPT_{Loan} memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap peningkatan *audit delay*. Secara keseluruhan hasil ini mampu mendukung hipotesis 2 yang penulis ajukan bahwa *related party transaction* mampu memoderasi pengaruh *Political Connection* terhadap *Audit Delay*. Artinya, dengan adanya transaksi pihak berelasi semakin memperpanjang terjadinya *audit delay*.

Hasil lain yang ditunjukkan oleh variabel kontrol, menunjukkan kondisi yang tidak terlalu berbeda seperti yang ditunjukkan pada hasil sebelumnya (hasil pengujian hipotesis 1). Variabel SIZE dan LEV tetap menunjukkan koefisien positif (masing-masing sebesar 0,010 dan 0,123) dengan nilai signifikansi masing-masing sebesar 0.031 dan 0.000 lebih kecil dari nilai alpha ($\alpha = 0,05$ dan 0,001). Konsisten dengan pengujian hipotesis pertama, bahwa perusahaan dengan ukuran (SIZE) dan tingkat utang yang besar mempunyai kompleksitas dan risiko yang lebih besar, sehingga akan membuat auditor lebih lama dalam melakukan penyelesaian proses audit. Tingkat pertumbuhan perusahaan (GROWTH) tetap tidak memberikan pengaruh terhadap lamanya auditor dalam menyelesaikan proses audit.

Besaran koefisien determinasi (R^2) pada pengujian hipotesis 2 menunjukkan nilai sebesar 0.172. Hasil ini menunjukkan bahwa penggunaan variabel moderasi RPT (RES_RPT_{Sales} dan RES_RPT_{Loan}) bersama-sama dengan variabel utama *political connection* dan variabel kontrol yang digunakan (SIZE, LEV, dan GROWTH) mampu meningkatkan *Audit Delay* (AuDel) sebesar 17,20% dan sisanya (sebesar 82,8%) sangat dipengaruhi oleh variabel lainnya. Di samping itu juga, dengan menggunakan variabel moderasi RPT (RES_RPT_{Sales} dan RES_RPT_{Loan}) koefisien determinasi (R^2) mengalami peningkatan sebesar 7,5%. Artinya, bahwa RPT mampu memperkuat pengaruh *political connection* (PolC) terhadap *audit delay* (AuDel).

4.2 Diskusi

Seperti telah disajikan pada hasil pengujian hipotesis 1, hasil pengujian menunjukkan konsisten dengan hipotesis yang diajukan pada penelitian ini. Artinya, perusahaan yang terlibat dalam koneksi politis (*political connection*) secara signifikan berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Perusahaan yang memiliki koneksi politis pada setiap tahun pengamatan cenderung mengalami *audit delay* yang panjang, karena dengan adanya koneksi politis tersebut perusahaan akan mendapatkan beberapa keuntungan dalam memperlancar bisnis perusahaan. Namun, koneksi politis cenderung dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai cara untuk menutupi kecurangan yang dilakukan. Perusahaan yang memiliki koneksi politis umumnya memiliki pengendalian dan pemantauan yang rendah (Faccio, 2006) sehingga cenderung untuk melakukan tindak kecurangan. Selain itu, perusahaan yang terlibat koneksi politis memperoleh keuntungan dari koneksi tersebut berupa jaminan perlindungan dari pemerintah (Faccio, 2006). Adanya kecurangan yang ditutupi oleh perusahaan yang terlibat koneksi politis mengakibatkan auditor sulit untuk menelusuri transaksi-transaksi ataupun kegiatan yang mengandung unsur kecurangan, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan proses audit. Hal ini menyebabkan terjadinya *audit delay* yang lebih lama.

Pengujian hipotesis 2 menunjukkan bahwa dengan digunakannya transaksi dengan pihak yang berelasi memperkuat pengaruh *political connection* terhadap *audit delay*. Perusahaan yang terkoneksi politis umumnya cenderung melakukan transaksi pihak berelasi. Kecenderungan perusahaan yang terkoneksi politis melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi dapat disebabkan untuk memberikan keuntungan bagi para pemegang mayoritas dan pihak-pihak yang terkoneksi politis agar tetap menjaga hubungan diantara mereka. Peningkatan hubungan yang baik tersebut berfungsi bagi perusahaan untuk mendapatkan akses yang dibutuhkan dan terutama mendapatkan jaminan perlindungan hukum, sehingga tetap menjaga stabilitas usaha perusahaan. Di samping itu juga, dengan melakukan transaksi dengan pihak yang berelasi memungkinkan perusahaan melakukan proses ekspropriasi melalui kegiatan *tunneling* demi kepentingan pihak pemegang saham mayoritas tetapi mengorbankan pihak pemegang saham minoritas. Hal tersebut menunjukkan bahwa transaksi dengan pihak-pihak berelasi banyak menyimpan unsur negatif bagi kepentingan secara umum. Oleh sebab itu, kondisi ini memberikan sinyal negatif bagi auditor dalam melakukan pekerjaan

audit yang dilakukan. Auditor akan lebih berhati-hati dalam melakukan pengumpulan bukti-bukti pemeriksaan dan tidak menutup kemungkinan akan memperluas ruang lingkup auditnya. Dengan demikian, auditor akan membutuhkan waktu yang lebih lama dalam melakukan proses penyelesaian audit yang mereka lakukan.

5. KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN KETERBATASAN

Penelitian ini dilakukan untuk melakukan pengujian terhadap pengaruh adanya koneksi politis (*political connection*) terhadap *audit delay* dan dampak penggunaan transaksi pihak berelasi (*related party transaction*) dalam memoderasi pengaruh adanya koneksi politis (*political connection*) terhadap *audit delay*. Berdasarkan pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa (1) adanya koneksi politis (*political connection*) memberikan pengaruh terhadap semakin lamanya masa penyampaian laporan audit (*audit delay*), dan (2) transaksi pihak berelasi (*related party transaction*) semakin meningkatkan pengaruh (*political connection*) terhadap *audit delay*. Hasil pengujian pertama memberikan makna bahwa koneksi politik (*political connection*) mengindikasikan kemungkinan terjadinya kecurangan-kecurangan sehingga membuat auditor semakin berhati-hati dalam melakukan proses audit yang dilakukan. Keadaan ini mengakibatkan semakin lamanya masa penyampaian laporan hasil audit. Sama halnya dengan pengujian pertama, hasil pengujian kedua menunjukkan tingginya tingkat risiko bisnis yang disebabkan adanya transaksi pihak berelasi (*related party transaction*) pada perusahaan yang terlibat dalam koneksi politis dan membuat auditor lebih sensitif terhadap informasi yang akan dikumpulkan, sehingga semakin meningkatkan lamanya masa penyampaian laporan audit. Hal ini disebabkan bahwa transaksi pihak berelasi (*related party transaction*) pada perusahaan sampel cenderung mengarah pada transaksi pihak berelasi yang bersifat abnormal (mengindikasikan adanya penyalahgunaan transaksi pihak berelasi).

Penelitian ini memberikan implikasi bahwa auditor harus lebih seksama dalam melakukan proses audit pada perusahaan yang terkoneksi secara politis dan melakukan transaksi pihak berelasi. Walaupun koneksi politis dan transaksi pihak berelasi tidak selamanya memberikan indikasi negatif, tetapi hal tersebut tetap memberikan sinyal negatif. Oleh sebab itu, hendaknya kantor akuntan memberikan penugasan kepada auditor yang lebih berpengalaman dan auditor yang mempunyai spesialis di bidang tertentu.

Keterbatasan penelitian ini pada sampel penelitian yang terbatas pada sektor manufaktur, sehingga mempengaruhi generalisasi hasil penelitian. Oleh sebab itu, bagi kepentingan penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas kelompok industri yang digunakan sebagai sampel penelitian. Di samping itu juga, bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan indikator lain dalam mengukur transaksi pihak berelasi (*related party transaction*), seperti transaksi pembelian yang berelasi dan jaminan berelasi.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Adhikari, Ajay, Chek Derashid dan Hao Zhang. 2006. Public Policy, Political Connections And Effective Tax Rates: Longitudinal Evidence From Malaysia. *Journal of Accounting and Public Policy*, Vol 25, pp. 574-995.
- Aharony, Joseph, Jiwei Wang, dan Hongqi Yuan. 2010. Tunnelling As An Incentive For Earnings Management During The IPO Process In China, *Journal of Accounting and Public Policy*, Vol. 29 No. 1, pp. 1-26.
- Arens, Alvin A., Randal J. Elder, Mark S. Beasley, dan Chris Hogan. 2017. *Auditing And Assurance services : An Integrated Approach*. Edisi 16. Boston : Pearson Education, Inc.
- Ashton, R. H., Willingham, J. J. dan Elliott, R. K. 1987. An Empirical Analysis Of Audit Delay. *Journal of Accounting Research*. Vol. 25 No. 2, pp. 275-292.
- Ashton, Robert H., R.H., John J. Willingham, dan Robert K. Elliott. 1987. An Empirical Analysis Of Audit Delay. *Journal of Accounting Research*, Vol. 25 No. 2, pp. 275-292.
- Bamber, E. M., Bamber, L. S. dan Schoderbek, M. P. 1993. Audit Structure And Other Determinants Of Audit Report Lag: An Empirical Analysis. *Auditing: A Journal of Practice & Theory*. Vol. 2, No.1, pp. 1-23.
- Bamber, E. Michael, Linda Smith Bamber, dan Michael P Schoderbek. 1993. Audit Structure And Other Determinants Of Audit Report Lag: An Empirical Analysis, *AUDITING: A Journal of Practice & Theory*, Vol. 2 No. 1, pp. 1-23.
- Bapepam LK. 2003. *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-36/PMK/2003, tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala*. Jakarta.
- Berkman, Henk, Rebel A. Cole, dan Lawrence J. Fu. 2009. Expropriation Through Loan Guarantees To Related Parties: Evidence From China. *Journal of Banking and Finance*, Vol. 33 No. 1, pp. 141-156.
- Chaney, Paul K., Mara Faccio, dan David Parsley. 2011. The Quality Of Accounting Information In Politically Connected Firms. *Journal of Accounting and Economics*, Vol. 51, Issues 1-2, pp. 58-76.

- Chen, Jean Jinghan, Peng Cheng, dan Xinrong Xiao. 2010. Related Party Transactions As A Source Of Earnings Management, *Applied Financial Economics*, Vol. 21 No. 3, pp. 165-181.
- Chen, Shenglan, Kun Wang, dan Xiaoxue Li. 2012. Product Market Competition, Ultimate Controlling Structure And Related Party Transactions. *China Journal of Accounting Research*, Vol. 5 No. 4, pp. 293-306.
- Cheung, Yan-Leung, P. Raghavendra Rau, dan Aris Stouraitis. 2006. Tunneling, Propping, And Expropriation: Evidence From Connected Party Transactions In Hong Kong. *Journal of Financial Economics*, Vol.82, Issue 2, pp. 343-386.
- Chien, Chu-Yang dan Joseph C. S. Hsu. 2010. The Role Of Corporate Governance In Related Party Transactions. *SSRN eLibrary*.
- Choi, Jay Pil, & Marcel Thum, M. 2009. The Economics Of Politically-Connected Firms. *International Tax and Public Finance*, 16, pp. 605–620.
- Christian, Leuz, dan Felix Oberholzer-Gee. 2006. Political Relationships, Global Financing, And Corporate Transparency: Evidence From Indonesia. *Journal of Financial Economics*, Vol. 81 No. 2, pp. 411-439.
- Cohen, Jeffrey R., dan Dennis M. Hanno. 2000. Auditors' Consideration Of Corporate Governance And Management Control Philosophy In Preplanning And Planning Judgments. *AUDITING: A Journal of Practice and Theory*, Vol. 19 No. 2, pp. 133-146.
- Durand, Giselle. 2019. The Determinants Of Audit Report Lag: A Meta-Analysis. *Managerial Auditing Journal*, Vol. 34 Issue: 1, pp.44-75.
- Faccio, M. 2006. Politically connected firms. *The American Economic Review*, Vol. 96 No. 1, pp. 369-386.
- Gordon, Elizabeth. A., Elaine Henry, dan D. Palia. 2004. Related Party Transactions And Corporate Governance. *Advances in Financial Economics*, Vol. 9, pp 1-27.
- Guedhami, Omrane, Jeffrey A. Pittman, dan Walid Saffar. 2014. Auditor Choice In Politically-Connected Firms. *Journal of Accounting Research*, 52(1), 107–162.
- Gul, Ferdinand A. 2006. Auditors' Response To Political Connections And Cronyism In Malaysia. *Journal of Accounting Research*, Vol. 44 No. 5, pp. 931-963.
- Habib, Ahsan dan Md. Borhan Uddin Bhuiyan. 2011. Audit Firm Industry Specialization And The Audit Report Lag. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, Vol. 20 No. 1, pp. 32-44.
- Habib, Ahsan, Abdul Haris Muhammadi, dan Haiyan Jiang. 2017. Political Connections and Related Party Transactions: Evidence from Indonesia. *The International Journal of Accounting*, Vol. 52 Issue: 1, pp. 45-63.
- Habib, Ahsan dan Abdul Haris Muhammadi. 2018. Political Connections And Audit Report Lag: Indonesian Evidence. *International Journal of Accounting & Information Management*, Vol. 26 Issue: 1, pp.59-80.
- Houston, Joel F., Liangliang Jiang, Chen Lin, dan Yue Ma. 2014. Political Connections And The Cost Of Bank Loans. *Journal of Accounting Research*, Vol. 52 No. 1, pp. 193-243.

- Ikatan Akuntan Indonesia. 2018. Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia.
- Jiang, Guohua, Charles M.C.Lee, dan HengYue. 2010. Tunneling Through Intercorporate Loans: The China Experience. *Journal of Financial Economics*, Vol. 98, Issue 1, pp. 1-20
- Johnson, Simon, Rafael La Porta, Florencio Lopez-de-Silanes, dan Andrei Shleifer. 2000. Tunneling. *The American Economic Review*, 90, 22-27.
- Keng, I, Liu, Y. Angela, dan Lin, Wen-Yi. 2010. Related Party Transactions, Firm Performance And Control Mechanisms: Evidence From Taiwan. *International Research Journal of Finance and Economics* ISSN 1450-2887 Issue 35.
- Khan Arifur, Dessalegn Getie Mihret, dan Mohammad Badrul Muttakin. 2016. Corporate Political Connections, Agency Costs And Audit Quality. *International Journal of Accounting & Information Management*, Vol. 24 No. 4, pp. 357-374.
- Li, Hongbin, Lingsheng Meng, QianWang, dan Li-An Zhou. 2008. Political Connections, Financing And Firm Performance: Evidence From Chinese Private Firms. *Journal of Development Economics*, 87, 283–299.
- Miettinen, T., & Poutvaara, P. 2014. A Market For Connections. *European Journal of Political Economy*, Vol. 33, pp. 37–52.
- Ming Jian, dan T. J. Wong. 2010. Propping Through Related Party Transactions. *Review of Accounting Studies*, Vol. 15 No. 1, pp. 70-105.
- Narjess, Boubakri, Omrane Guedhami, DevMishra, dan Walid Saffar. 2012. Political Connections And The Cost Of Equity Capital. *Journal of Corporate Finance*, Vol. 18 No.3, pp. 541-559.
- Qian, Meijun, Hongbo Pan, dan Bernard Yin Yeung. 2011. Expropriation Of Minority Interest Shareholders In Politically-Connected Firms. *SSRN eLibrary*.
- Sekaran, Uma, dan Roger Bougie. 2016. *Research Methods For Business : A Skill-Building Approach*. Edisi 7. Chichester-West Sussex : John Wiley & Sons.
- Su, Zhong-qin , Hung-gay Fung, dan Jot Yau. 2013. Political Connections And Corporate Overinvestment: Evidence From China. *International Journal of Accounting and Information Management*, Vol. 21 No. 4, pp. 285-296.
- Wu, Wenfeng, Chongfeng Wu, dan Oliver M. Rui. 2012. Ownership And The Value Of Political Connections: Evidence From China. *European Financial Management*, Vol. 18, Issue 4, pp. 695–729.
- Yeh, Yin-Hua, Pei-Gi Shu, dan Yu-Hui Su. 2012. Related-Party Transactions And Corporate Governance: The Evidence From The Taiwan Stock Market. *Pacific-Basin Finance Journal*, Vol. 20, Issue 5, pp. 755-776.
- Yuki, Fukuoka. 2013. Indonesia's 'Democratic Transition' Revisited: A Clientelist Model Of Political Transition. *Democratization*, Vol. 20, No. 6, pp. 991 – 1013.